

**ANALISIS DETERMINAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
DI INDONESIA TAHUN 2011-2019**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

INDAH SETIANI

17108010023

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

**ANALISIS DETERMINAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
DI INDONESIA TAHUN 2011-2019**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

INDAH SETIANI
NIM. 17108010023

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. TAOSIGE WAU, S.E., M.Si.
NIP. 19840919 201903 008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-296/Un.02/DEB/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS DETERMINAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI INDONESIA TAHUN 2011-2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDAH SETIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17108010023
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 606a62a9ac652



Penguji I

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 6061852549db3



Penguji II

Riswanti Budi Sekaringsih, M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 606acd57d64f



Yogyakarta, 19 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 606d29af49301

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Indah Setiani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Indah Setiani

NIM : 17108010023

Judul Skripsi : “Analisis Determinan Industri Pariwisata di Indonesia Tahun 2011-2019”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si.
NIP. 19840919 201903 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Setiani

NIM : 17108010023

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Determinan Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia Tahun 2011-2019**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Maret 2021



Indah Setiani
17108010023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Setiani
NIM : 17108010023
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Determinan Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia Tahun 2011-2019”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hal Bebas Royalti Noneksklusif ini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penyusun dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal, 1 Maret 2020
Yang menyatakan,



Indah Setiani
17108010023

MOTTO

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

“Dan Sesungguhnya Dialah (Allah) yang menjadikan orang tertawa dan menangis”

{Q.S An-Najm [53]: 43}

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku”

{Q.S Thahah [20]:114}

“Jadikan hari ini Pembelajaran, dan esok adalah Kesuksesan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang tua
tercinta,

Ibu Siti Rohani dan Bapak Rambiat

yang selalu mengajarkan aku untuk belajar, kerja keras,
sabar dan selalu berjuang dalam menjalani kehidupan.

Teruntuk juga Mbak-mbak ku tercinta,

Mbak Vivi Wahyuni yang selalu mengajarku keberanian,

Mbak Noni Afi Yanti yang selalu mengajarku kesabaran, dan
untuk

Mbak Ayu Lestari yang selalu memberikan aku *support* dan
arahan selama aku kuliah.

Izinkanlah aku mengucapkan terima kasih untuk semua doa yang
selalu engkau panjatkan kepada Allah SWT untuk Anak dan Adik
tercinta.

Serta untuk Almamater tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma dibalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدد	Ditulis	'iddah

C. Tā' marbūtah

Semua *tā marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada ditengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vocal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Ḍukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>Yaḏhabu</i>

E. Vocal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ā</i>

تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antun</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawial-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlah-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam selalu penulis haturkan kepada *khotamul anbiya' wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mampu meneladani akhlak beliau sehingga pantas untuk mendapat syafaat di hari kiamat kelak.

Skripsi yang saya tulis dan saya susun ini merupakan hasil penelitian saya dalam rangka menyelesaikan studi Sarjana Strata I dalam program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I, M.Sc.Fin. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Taosige Wau, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing dari awal hingga selesai penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan selama kuliah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen Program Studi Ekonomi Syari'ah dan juga Dosen-Dosen yang telah mengajarkanku, dan yang telah memberikan ilmunya yang kini menjadi goresan tinta yang tertulis di buku kuliahku.
7. Seluruh Pegawai Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua Orang Tua Ibu Siti Rohani dan Bapak Rambiat serta Mbak-mbak ku Vivi Wahyuni, Noni Afi Yanti dan Ayu Lestari yang selalu memberikan motivasi terbesar dalam sejarah hidupku.
9. Sahabat-sahabatku di Kampus Kak Tuti, Evi, Asvira, Mba Anis yang selalu menjadi pendengar setia keluh kesah di Kampus, serta Aji, Sofwan dan Deni, temen kuliah dan PKL di Kabupaten Bantul.
10. Sahabat-sahabatku (Mbak-mbak Asrama Annisa', Mbak-mbak Cashol 2017) dan Adik tingkatku di Asrama Annisa' Pondok Pesantren Wahid Hasyim, khususnya Siti Nur Azizah, yang menemaniku dan yang selalu mengingatkanku untuk berbagi energi positif antar sesama.

11. Organisasi-organisasi yang memberiku pelajaran, mengajarkanku, dan mengantarkanku sampai sekarang, KMNU UIN Sunan Kalijaga (Santri 3), FEBIPRENEUR (2018) , dan GenBI Yogyakarta (2019 & 2020).
12. Teman-teman seperjuangan INFEST 2017 (Ekonomi Syari'ah 2017) yang kebersamaiku belajar selama proses perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan semasa KKN masa Covid -19, KKN Mandiri UIN Sunan Kalijaga angkatan 102 Kelompok 34 di Mesuji Raya Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan yang banyak memberikan pengalaman hidup tentang perbedaan adat istiadat, dan juga kepada pemerintah dan masyarakat Desa Gedung Rejo yang telah memberikan kami kesempatan untuk bergabung, belajar dan menambah pengalaman di Desa Gedung Rejo.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan selama ini menjadi amal saleh dan mendapat balasan apa yang telah Allah berikan dan semoga skripsi ini mampu dibaca dan bermanfaat.

Yogyakarta, 1 Maret 2021

Penulis



Indah Setiani
NIM. 17108010023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
<i>ABSTRACT</i>	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Pembangunan Daerah.....	15
2. Pariwisata	22
3. Pengeluaran Pemerintah.....	30
4. Penanaman Modal.....	38
5. Tenaga kerja	44
B. Telaah Pustaka	49
C. Pengembangan Hipotesis	58
D. Kerangka Penelitian	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Metode Penelitian.....	63
1. Jenis Penelitian.....	63
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian	63
3. Populasi dan Sampel	64
4. Definisi Operasional variabel.....	65
B. Teknik Analisis Data.....	68
1. Metode Analisis	68
2. Model Estimasi Regresi Data Panel.....	69
3. Pemilihan Regresi Data Panel.....	71
4. Uji Asumsi Klasik.....	73
5. Uji Statistik	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	79
1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	79
2. Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia Tahun 2011- 2019.....	83
3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2011-2019	85
4. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Tahun 2011-2019	87
5. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Tahun 2011-2019	89
6. Perkembangan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2011-2019	91
B. Analisis Data Penelitian	92
1. Deskriptif Data Penelitian.....	92
2. Analisis Data Penelitian	95
a. Hasil Estimasi Model.....	95
b. Pemilihan Model Terbaik.....	98
c. Uji Asumsi Klasik.....	100
d. Pengujian Hipotesis.....	105
e. Analisis Model Penelitian	109
C. Pembahasan Hasil Penelitian	113
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia.....	113

2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia	116
3. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia	119
4. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia	121
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Implikasi.....	131
C. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN.....	xxvii
DATA DIRI	xli

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga kerja dan Jumlah Pengangguran Di Indonesia Tahun 2011-2018	4
Tabel 1.2 Pengeluaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011-2019 (Miliar Rupiah).....	7
Tabel 2.1 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.....	20
Tabel 2.2 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	51
Tabel 3.1 Satuan Hitung Variabel	65
Tabel 4.1 Data Statistik Deskriptif.....	93
Tabel 4.2 Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i>	95
Tabel 4.3 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	96
Tabel 4.4 Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i>	97
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	98
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	99
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	101
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	102
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas.....	103
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi	103
Tabel 4.11 Hasil <i>Robust Standar Error</i>	104
Tabel 4.12 Hasil Uji F (Uji Simultan).....	105
Tabel 4.13 Hasil Uji t (Uji Parsial)	106
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)	109

Tabel 4.15 Hasil Estimasi Regresi *Fixed Effect Model* dengan *Robust*

Standard Error 110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) dalam Miliar Rupiah	2
Gambar 1.2 Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (Miliar US \$).....	5
Gambar 2.1 Dampak Ganda Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian..	28
Gambar 2.2 Perbandingan Kurva Wagner, Sollow, Musgrave dan Peacock dan Wiseman.....	34
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	62
Gambar 4.1 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia	80
Gambar 4.2 Jumlah Cadangan Devisa Indonesia Sektor pariwisata.....	84
Gambar 4.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Menurut Provinsi (Dalam Juta Rupiah)	86
Gambar 4.4 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Tahun 2011-2019	88
Gambar 4.5 Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2011-2019	89
Gambar 4.4 Jumlah Angkatan kerja di Indonesia Tahun 2011-2019.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an	xxvii
Lampiran 2: Data Penelitian.....	xxviii
Lampiran 3: Statistik Deskriptif.....	xxxiv
Lampiran 4: Pemilihan <i>Common Effect Model</i>	xxxiv
Lampiran 5 : Pemilihan <i>Fixed Effect Model</i>	xxxv
Lampiran 6 : Pemilihan <i>Random Effect Model</i>	xxxv
Lampiran 7 : Uji Chow	xxxvi
Lampiran 8 : Uji Hausman.....	xxxvii
Lampiran 9 : Uji Normalitas	xxxviii
Lampiran 10 : Uji Multikolineatitas.....	xxxviii
Lampiran 11 : Uji Heteroskedastisitas	xxxix
Lampiran 12 : Uji Autokorelasi	xxxix
Lampiran 13 : Uji <i>Robust Standard Error</i>	xl
Lampiran 14 : Curriculum Vitae.....	xli

ABSTRACT

This research aims to see the development tourism industry in Indonesia and analyze how to influence local government expenditure, domestic investment (PMDN), foreign investment (PMA), and labor towards the development tourism industry in Indonesia from 2011 to 2019. The development industry tourism which is a new trend today, because multiplier effect in tourism industry which are widespread in almost all industrial sectors. This research use quantitativ methods types of secondary data obtained from Central Statistical Agencies (Badan Pusat Statistik) and and Ministry of Tourism and Creative Economy. In this research to uses panel regression with the best model is Fixed Effect Model (FEM), to find out how much influence independent variable to the development of the tourism industry in Indonesia. Based on the results test F, shows that simultaneously or collectively independent variable positive and significant effect to the development of the tourism in Indonesia. on the test-T show that all independent variable to positive and significant effect to the development of the tourism in Indonesia.

Keywords : The development of the tourism industry, local government expenditure, domestic local, foreign investment, and labor.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan industri pariwisata di Indonesia dan menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, penanam modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA) dan tenaga kerja terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2019. Perkembangan industri pariwisata yang menjadi trend baru saat ini, dikarenakan efek pengganda (*multiplier effect*) industri pariwisata yang menyebar hampir diseluruh sektor industri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kemenparekraf. Pada penelitian ini juga menggunakan regresi data panel dengan model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM), untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Pada hasil uji T menunjukkan bahwa semua variabel independen juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia.

Kata kunci : Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia, Pengeluaran Pemerintah daerah, PMDN, PMA dan Tenaga Kerja.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

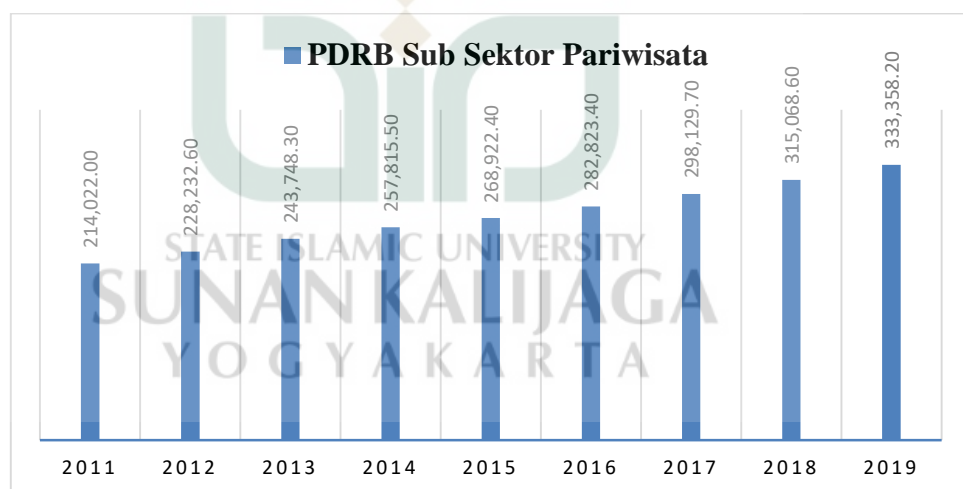
Pesona Indonesia hampir terdapat diseluruh wilayahnya. Terbentangnyalautan, gunung dan daratan menjadikan kekuasaan Allah SWT yang tidak terbandingkan. Terlihat melalui beragam pemandangan alam, budaya, adat istiadat maupun kuliner menjadi ciri khas Nusantara sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika yang patut untuk dijaga dan dilestarikan, salah satunya melalui industri pariwisata. Industri pariwisata tidak seperti industri lain pada umumnya, yang terus mengambil sumber daya alam sehingga menyebabkan kepunahan. Sebaliknya, membangun industri pariwisata justru berarti mempercantik negeri, dimana akan mendatangkan manfaat seperti bertambahnya devisa negara tanpa menghabiskan sumber daya alam yang semakin langka (Judisenno, 2019).

Pariwisata sampai saat ini berkembang menjadi salah satu industri baru yang perencanaan dan sistemnya perlu pengembangan secara benar. Menurut Bafadhal (2018) pariwisata sebagai industri baru merupakan sebuah sistem yang kompleks dan menyeluruh sehingga melibatkan banyak orang yang berpartisipasi dengan komponen-komponen pendukungnya. Komponen tersebut bisa berasal dari wisatawan, destinasi wisata, usaha pariwisata, lembaga-lembaga pariwisata serta organisasi-organisasi yang saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lainnya.

Sebagai wilayah yang beragam, Indonesia memiliki destinasi wisata dengan keunikan-keunikan tersendiri yang terdapat pada setiap daerahnya.

Pengelolaan yang baik dan terencana untuk mendapatkan hasil optimal dan tempat yang layak guna dijadikan daerah destinasi wisata yang dibanggakan, perlu dilakukan perbaikan secara konsisten (Windriyaningrum, 2013). Seperti penyediaan akomodasi berupa sarana dan prasarana dalam proses pariwisata, yaitu melalui akses tempat tinggal berupa hotel, penginapan dan sejenisnya. Dan juga melalui penyediaan makan dan minum dalam proses pariwisata.

Pariwisata merupakan sektor perekonomian yang menjadi perhatian dari beberapa provinsi di Indonesia, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali dan provinsi-provinsi lainnya. Dengan menggunakan pendekatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, kontribusi sektor ini mampu bersaing dengan sektor PDRB lainnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) dalam Miliar Rupiah

Dari grafik 1.1 di atas dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir PDRB sektor pariwisata (pendekatan akomodasi dan makan minum) mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Seperti tahun 2019 yaitu berjumlah Rp333.358,20 miliar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp315.068,60 miliar. Percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan salah satu faktor dari perkembangan sektor pariwisata, karena industri pariwisata dapat menciptakan permintaan, yaitu baik menciptakan permintaan konsumsi dan juga permintaan investasi, hingga pada akhirnya akan tercipta *multiplier effect* seperti kegiatan produksi barang dan jasa, baik berupa barang konsumsi maupun barang modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkova et al., (201 C.E.) yang menyatakan bahwa secara parsial adanya pengaruh positif signifikan antara jumlah akomodasi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor penyediaan akomodasi di 33 provinsi di Indonesia. Adanya pengaruh tersebut membuktikan bahwa dalam peningkatan perkembangan ekonomi Indonesia, sub sektor akomodasi mempunyai potensi yang baik dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Penelitian dengan variabel yang berbeda dilakukan oleh Windriyaningrum (2013) bahwa jumlah tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana hal ini dapat dinyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap pendapatan sektor industri pariwisata Kabupaten Kudus. Penelitian lain oleh Munanda dan Amar (2018) tentang tingkat hunian hotel yang juga memiliki pengaruh terhadap pendapatan sektor pariwisata di Indonesia secara signifikan.

Sektor pariwisata dalam hal ini dengan pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan usaha yang membawa peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Industri Pariwisata memiliki potensi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, melalui terbentuknya usaha-usaha seperti perhotelan, transportasi, dan makanan, dimana ini merupakan *multiplier effects* dari sektor pariwisata (Direktorat Jenderal Anggaran, 2016).

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Pengangguran Di Indonesia Tahun 2011-2018 (orang)

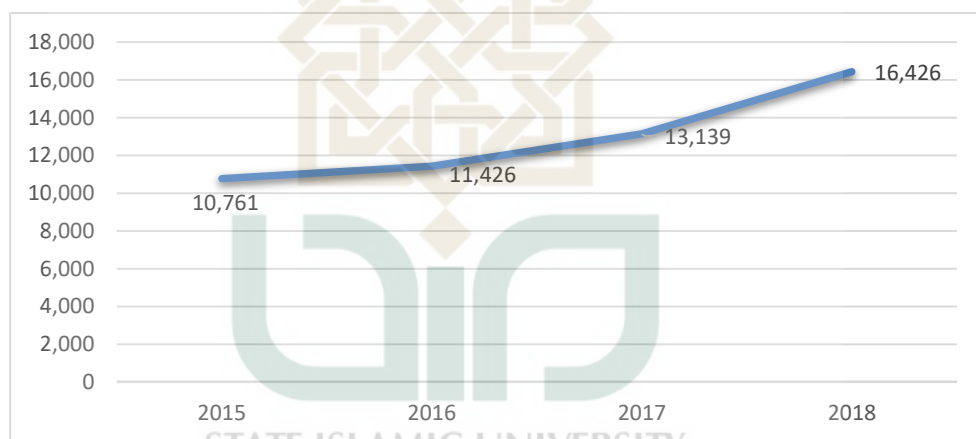
Tahun	Bekerja	Pengangguran
2011	107.416.309	8.681.392
2012	112.504.868	7.344.866
2013	112.761.072	7.410.931
2014	114.628.026	7.244.905
2015	114.819.199	7.560.822
2016	118.411.973	7.031.775
2017	121.022.423	7.040.323
2018	124.004.950	7.000.691

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari tabel 1.1 diketahui jumlah tenaga kerja yang bekerja usia 15 tahun ke atas semakin meningkat, yaitu sejak tahun 2011-2018. Hal ini juga diiringi dengan pengurangan tingkat pengangguran. Tentu ini tidak lepas dari adanya industri-industri baru yang berkembang dengan pesat. Seperti adanya industri pariwisata yang akan menambah jumlah lapangan pekerjaan baru dimana hal ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang berstatus pengangguran. Sebagaimana penelitian oleh Arisutha (2013) dimana jumlah industri pariwisata memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja penduduk Provinsi Bali secara positif dan signifikan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Tradena

(2017) yang menyatakan bahwa industri pariwisata (hotel dan perjalanan biro pariwisata) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sektor industri pariwisata yang dewasa ini menjadi industri baru merupakan tantangan bagi pemerintah untuk pengembangan yang lebih baik. Pendapatan dari sektor pariwisata yang meningkat ini berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan cadangan devisa sektor pariwisata. Terlihat melalui pendapatan devisa Indonesia dari sektor pariwisata yang sampai saat ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2020

Gambar 1.2 Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (Miliar US \$)

Dilihat dari grafik 1.2 tersebut, potensi penerimaan devisa setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2015 penerimaan devisa atas sektor pariwisata sebesar 10,761 miliar US \$, hingga pada tahun 2018 meningkat sebesar 16,426 miliar US \$. Dari sisi pencapaian devisa sektor pariwisata, upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata tentu menjadi faktor utama. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah antara lain seperti penataan destinasi wisata dan pengembangan produk, promosi terhadap industri pariwisata hingga

penataan dari kelembagaan bidang kepariwisataan (Direktorat Jenderal Anggaran, 2016).

Pertumbuhan jumlah wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam negeri merupakan salah satu yang menjadikan peningkatan cadangan devisa negara di sektor pariwisata. Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2018, peranan sektor pariwisata mempunyai dampak pada pengganda output, nilai tambah, pendapatan dan tenaga kerja rata-rata di atas 2. Artinya, dengan peningkatan pendapatan sektor pariwisata sebesar satu satuan (dalam juta rupiah) akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 2 (Tanaya, 2018).

Perhatian pemerintah untuk sektor pariwisata juga memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, baik pemerintah sendiri maupun dari masyarakat. Tentu ini merupakan peranan pemerintah untuk pengembangan sektor pariwisata melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran yang digunakan untuk membiayai program yang dijalankan pemerintah akan mencerminkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pengeluaran pemerintah tersebut adalah cerminan dari ketetapan pemerintah dalam membeli barang dan jasa (Sunusi et al., 2014). Salah satu kebijakan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan di sektor pariwisata. Peran pemerintah disini untuk menyediakan kebutuhan yang tidak disediakan oleh pihak swasta, melalui penyediaan barang publik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya.

Menurut Julianto & Marta (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi industri pariwisata sangat banyak. Salah

satunya adalah penyediaan sarana dan prasana menjadi faktor terpenting dalam perkembangan industri pariwisata. Namun hasil penelitiannya yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan teori yang ada. Pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh negatif terhadap perkembangan industri pariwisata, dikarenakan kurangnya pembiayaan/anggaran untuk sektor pariwisata yang sangat minimum sehingga efek penerimaannya pun juga menjadi sangat kecil.

**Tabel 1.2 Pengeluaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011-2019
(Miliar Rupiah)**

Tahun	Pengeluaran Negara
2011	1,294,999.10
2012	1,491,410.20
2013	1,650,563.70
2014	1,777,182.80
2015	1,806,515.20
2016	1,864,275.10
2017	2,007,351.80
2018	2,213,117.80
2019	2,309,287.30

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari tabel 1.2 dapat diketahui besaran realisasi APBN untuk pengeluaran negara. Di tengah pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya meningkat, namun tidak mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi pada daerah tertentu. Penelitian yang dilakukan Putri (2019) tentang pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata dan infrastruktur memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011-2015. Adapun pengeluaran pemerintah di sektor pertanian menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah melemahnya perekonomian negara, Indonesia sangat membutuhkan investasi-investasi untuk merealisasikan program kerja. Investasi tersebut bisa berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari modal asing. Investasi atau penanaman modal tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program kerja yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk peningkatan perkembangan pertumbuhan ekonomi, salah satunya industri pariwisata.

Penelitian dari Julianto & Marta (2019) tentang penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dengan variabel yang berbeda dilakukan oleh Wihda & Poernomo (2014) menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta, sedangkan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Perkembangan industri pariwisata menjadi *trend* baru, pasalnya negara Indonesia yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia menjadi salah satu peluang untuk menciptakan industri baru yang berkonsep syariah (*Halal Tourism*). Untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sendiri sangatlah sederhana, dimana hal tersebut sudah menyatu dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Pariwisata halal tidak disebut hanya sekedar wisata religi seperti umroh dan menunaikan haji, namun diartikan sebagai jasa wisata yang menyediakan bentuk hiburan, gaya, kebutuhan (makan dan minum) dan

permintaan pasar. Hal ini tidak semata untuk pengunjung muslim saja, namun berlaku untuk universal. Pada dasarnya inti visi dan misi pariwisata halal adalah kenyamanan bersama. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk [67]: ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah ta'ala telah menciptakan dan menjadikan bumi bukan hanya sekedar untuk dijelajahi saja, tetapi juga untuk dikenali dan disadari bahwa bumi dan seisinya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang halal dalam mencari nafkah. Pada dasarnya semua (manusia) pada akhirnya akan kembali kepada Allah Swt.

Di Indonesia *Halal Tourism* merupakan salah satu program dari Kementerian Pariwisata yang menjadi prioritas. Hal ini disebabkan pariwisata halal mempunyai prospek atau harapan ekonomi yang baik dalam menghadapi industri 4.0. Tujuan dari industri pariwisata ini bukan hanya saja memberikan manfaat dari aspek material, aspek spiritual dan juga aspek psikologis bagi wisatawan itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah dalam melakukan pembiayaan anggaran dari pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah daerah, investasi dan tenaga kerja juga sudah diatur dalam kitab Allah swt, sebagaimana Allah ta'ala telah memberikan kekayaan

¹ Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. Tim penyusun, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Banjarsari, Solo: Penerbit ABYAN, 2014)

alam di bumi berupa rezeki kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga membayar kewajibannya atas apa yang sudah didapatkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah ta'ala dalam surah At-Taubah [9]: 29. Selain itu dari sisi penanaman modal, Islam sangat menganjurkan manusia untuk selalu berusaha lebih baik dari hari sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya penanaman modal yang dilakukan baik individu ataupun instansi merupakan suatu rencana untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu mampu menyisakan sedikit hartanya untuk berinvestasi sebagai persiapan masa (ketidakpastian) yang akan datang. Sebagaimana hal ini diatur dalam al-Qur'an surah Yunus [10]: 47-49.

Berdasarkan dasar latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menulis tentang bagaimana pengaruh industri pariwisata di Indonesia. Dengan judul penelitian, **“Analisis Determinan Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia Tahun 2011-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang diulas dalam latar belakang, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia?
5. Bagaimana pengeluaran pemerintah daerah, penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA) dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan industri pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna untuk menjawab beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA) dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan industri pariwisata.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada penelitian ini, diharapkan sektor pariwisata akan berkembang dengan baik dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat melalui adanya pengembangan sektor pariwisata.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat penulis jadikan sebagai pengetahuan dan wawasan, mulai dari teori yang berkaitan hingga hasil yang dibuktikan dalam penelitian.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dari laporan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan merupakan acuan dasar yang menjadi alasan dilakukannya penelitian. Pada bab I terdiri empat sub bab, terdiri dari latar belakang, dimana pada bagian ini menguraikan bagaimana variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kedua dijelaskannya rumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan yang diceritakan penyelesaian melalui penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian ini. Ketiga ada tujuan penelitian yang akan diuraikannya dan yang keempat ada manfaat penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori merupakan bab yang memuat tinjauan pustaka serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu. Hal ini dilakukan guna mengetahui posisi penelitian. Pada bab ini digambarkan juga kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan dilakukan dari penelitian.

Bab III Metode Penelitian ada bab ini menjelaskan bagaimana deskripsi penelitian akan dilakukan secara operasional, baik berupa rancangan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengujian data serta metode analisis data.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian, pada permulaan bab ini akan digambarkan keadaan geografis, demografis, dan topografi objek penelitian secara singkat. Pada bab ini dilanjutkan tentang interpretasi hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian atas pengolahan data. Hasil

penelitian tersebut merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan pada penelitian.

Bab V Penutup yang merupakan kesimpulan atas jawaban akhir dari rumusan masalah dalam penelitian. Pada bab ini disampaikan juga implikasi, masukan dan saran atas adanya penelitian terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Implikasi, saran dan masukan dari penelitian ini berupa bagaimana kebijakan pemerintah yang dapat diturunkan berdasarkan temuan utama penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perkembangan Industri pariwisata semakin meningkat dan saat ini menjadi *trend* baru. Hal ini tentu tidak hanya disebabkan pada salah satu faktor saja yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor lain yang mendukung peningkatan perkembangan industri pariwisata di Indonesia, seperti pengeluaran pemerintah daerah, penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga tenaga kerja yang semuanya berperan dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan data panel, diperoleh pendekatan *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik. Setelah melalui uji asumsi klasik, didapatkan bahwa data hanya lolos uji multikolinearitas. Dengan asumsi jika $N > 30$, sehingga data dianggap memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan masalah heteroskedastisitas dan autokoreasi, dengan menggunakan *Robust Standard Error* didapatkan hasil yang lolos uji heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Model *robust fixed effect model* dari variabel dependen Perkembangan Industri Pariwisata dengan pendekatan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan variabel independen pengeluaran pemerintah daerah, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan tenaga kerja didapatkan *R-Square* sebesar 57.22 % maka dapat disimpulkan bahwa model

dapat menjelaskan sebesar 57.22 %, sedangkan 42.88 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Berdasarkan uji simultan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan uji t-statistik atau uji parsial dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah daerah, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia, sehingga dengan hal tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata diterima. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah maka akan mempengaruhi peningkatan perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Pengeluaran pemerintah akan menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di industri pariwisata yang akan meningkatkan jumlah wisatawan sehingga akan terjadi peningkatan perkembangan industri pariwisata.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata di terima. Hal ini

dikarenakan ketika penanaman modal dalam negeri bertambah maka akan banyak proyek yang tercipta sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan perkembangan industri pariwisata.

3. Penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa variabel penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia, sehingga H_a diterima. Realisasi penanaman modal asing yang semakin meningkat akan meningkatkan pembangunan proyek-proyek baru dimana hal ini akan menyerap tenaga kerja yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia.
4. Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Hipotesis ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya tenaga kerja yang bekerja pada industri pariwisata akan meningkatkan perkembangan industri pariwisata di Indonesia.
5. Secara keseluruhan dapat diketahui semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui hasil penelitian dengan melihat nilai F -Statistik $>$ F -tabel dan dengan melihat tingkat probabilitas uji simultan,

bahwa variabel bebas berpengaruh secara positif terhadap perkembangan industri pariwisata di Indonesia.

Dalam Islam peranan pemerintah sangat diperlukan dalam menentukan setiap kebijakan yang dijalankan. Oleh sebab itu, ketika menentukan anggaran untuk keuangan publik tidak hanya semata atas anggaran dari pemerintah saja, perlunya dana dari masyarakat yang dipungut dalam bentuk pajak. Hal ini juga sudah dilakukan pada masa Rasulullah Saw dan Sahabatnya yaitu pungutan atas hasil yang diperoleh, seperti zakat, infaq, shadaqoh dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk mengembangkan industri dan perekonomian di Indonesia juga membutuhkan suntikan dana dari investasi swasta/ penanaman modal asing dan dalam negeri. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan investasi. Karena pada dasarnya, akan ada masa masa dimana membutuhkan dana saat waktu yang tidak tepat. Dengan banyaknya investasi yang masuk dan berkembang di Indonesia, akan banyak proyek yang tercipta, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya dapat menimbulkan konsumsi pada masyarakat dan akhirnya bisa menumbuhkan perkembangan industri, salah satunya industri pariwisata di Indonesia.

B. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan penelitian ini tentang Determinan Perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia, penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan terutama bagi akademisi dan penelitian-penelitian selanjutnya tentang perkembangan industri pariwisata di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya pembuat kebijakan diharapkan untuk lebih mempertimbangkan banyak hal dalam kondisi perekonomian daerah terutama yang berhubungan dalam perkembangan industri pariwisata. Kebijakan terkait pengeluaran pemerintah daerah sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan memperhatikan aspek masalah untuk umat manusia. Kebijakan pengeluaran pemerintah tersebut terkait pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana dalam bidang pariwisata. Adanya peningkatan fasilitas seperti sarana dan prasarana yang baik pada suatu industri pariwisata akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga bagi wisatawan, yaitu untuk menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu kawasan industri, dan hal ini akan mendorong perkembangan industri pariwisata pada suatu daerah.
2. Pemerintah harus rajin mempromosikan agar penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing berjalan dengan baik, khususnya aliran masuk ke dalam negeri. Pemerintah perlu melakukan usaha peningkatan minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, melalui beberapa langkah, seperti pembukaan destinasi wisata baru dan juga

peningkatan akan sarana akomodasi. Pemerintah juga harus menciptakan iklim yang stabil di seluruh daerah Indonesia, sehingga minat investor akan bertambah untuk menanamkan modal di Indonesia.

3. Dalam prinsip ekonomi Islam, untuk mendorong perkembangan ekonomi suatu negara semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat berkesempatan yang sama dalam membangun negeri. Pengeluaran Pemerintah yang didapatkan melalui pendapatan negara seperti pajak harus didukung juga dari pendapatan zakat berdasarkan prinsip Islam. Tidak hanya zakat saja, adanya shadaqah, dan Infaq juga dapat mendorong perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, adanya investasi swasta akan mendorong penciptaan lapangan kerja untuk tenaga kerja yang gilirannya akan mendorong konsumsi dari tenaga kerja. Dimana tenaga kerja tersebut melalui pendapatannya akan mengonsumsi barang dan jasa melalui industri-industri. Karena efek dari industri pariwisata sendiri tidak hanya untuk industri pariwisata, seperti tingkat hunian hotel dan akomodasi, tetapi juga merambah ke sektor industri lainnya.

C. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari segala proses dan hasil penelitian ini memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu beberapa saran yang penulis berikan untuk penelitian selanjutnya semoga dapat menjadi arahan dan patokan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

1. Beberapa variabel independen dalam penelitian ini masih bersifat umum, perbandingan dengan variabel dependen yang sifatnya khusus. Penulis menyarankan kedepannya lebih diperhatikan dalam pemilihan variabel yang lebih spesifik. Dalam penelitian ini jarak antara variabel dependen dan variabel independen terdapat gap yang besar untuk berpotensi bias, sehingga perlu dilakukan pemilihan variabel agar hasil penelitian tidak menjadi bias. Variabel dependen yang bersifat khusus tersebut yaitu PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang digunakan untuk pendekatan sektor pariwisata, yang seharusnya dipengaruhi oleh variabel independen seperti pengeluaran pemerintah sektor pariwisata, PMDN dan PMA sektor pariwisata dan tenaga kerja sektor pariwisata. Sehingga hasil penelitian tidak akan menimbulkan bias yang besar.
2. Data dalam penelitian hanya mencakup 9 tahun, tidak dapat digenapkan menjadi 10 tahun observasi penelitian. Hal ini dikarenakan kurangnya data dari sumber penyedia data. Sehingga dalam penelitian ini hanya mencakup 9 tahun penelitian. Harapan kedepannya untuk tahun

penelitian bisa digenapkan tahunnya, agar tidak menimbulkan tahun penelitian yang tanggung.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. (2007). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Pert). Graha Ilmu.
- Arisutha, G. (2013). *Pengaruh Industri Pariwisata dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja serta PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten / Kota Provinsi Bali*. 2689–2717.
- Arsyad, L. (1999). *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi STIM YKPN Yogyakarta.
- Asworowati, R., & Widarjono, A. (2016). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Studi Kasus Di Bali, DIY, NTB Dan SUMUT. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53(9), 1689–1699.
- Asyari. (2009). Melacak Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara. *Al-Hurriyah*, 10(1), 1–19.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2).
- Bafadhal, A. S. (2018). *Perencanaan Bisnis Pariwisata: Pendekatan Lean Plsanning* (Pertama). UB Press.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Edisi Pert). BPFE Yogyakarta.
- Dewi, K. S. ayu P., & Meydianawathi, L. G. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Bali. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6, 622–647.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2016). *Kajian Di Bidang Penganggaran: Efektivitas Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata Terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Wisatawan Nusantara*. 1.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia* (U. G. Mada (Ed.)). Penerbit Erlangga.

- Erviana, E. (2018). Analisis Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung* (Vol. 10, Issue 2).
- Fadliyanti, L., Sutanto, H., & Wijimulawiani, B. S. (2019). Analisis Peran Sektor Pariwisata Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Pendekatan Location Quotient dan Klassen Typology Analysis). *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 106–114.
- Gujarati, D. N. (2000). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (1st ed.). Erlangga.
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 66–78.
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2008). *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis* (Pertama). Kencana.
- Ismayanti. (2011). *Pengantar Pariwisata* (Pertama). Grasindo.
- Judisenno, R. K. (2019). *Branding Destinasi dan Promosi Pariwisata* (Pertama). Gramedia Pustaka Utama.
- Julianto, D., & Marta, Z. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Sumatera Barat. *Menara Ilmu*, XIII(2), 102–114.
- Mahmud, A. M. (2020). Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* IV.
- Munanda, R., & Amar, S. (2018). *Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Rata-Rata Pengeluaran, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Indonesia Pada Sektor Pariwisata*.
- Novandre, I. E. (2019). Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2011-2018). *Skripsi*.

Nusa, A. T. S., & Khoirudin, R. (2020). Analisis Determinan PAD Sub Sektor Pariwisata Di DIY Periode 2012-2017. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 3(1), 1–13.

Octariza, N. P. (2018). *Pengaruh Sektor Pariwisata (Sub Sektor Perhotelan) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 1987-2016*. 1–17.

Payangan, O. R. (2013). *Pemasaran Pariwisata (Pertama)*. IPB PRESS.

Penanaman Modal Asing di Indonesia. (n.d.). Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Prasetyo, E. (2011). *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja , Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa (Vol. 3)*.

Pratomo, A. N. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Investasi Domestik dan Investasi Asing pada Sektor Pariwisata di Pulau Jawa*. 211.

Putri, H. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2), 237–251.

Ramdhan, M. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2011-2015)*. Fakultas Ekonomi Yogyakarta.

Rizkova, Y., Topowijono, & M.Djayusman. (201 C.E.). Pengaruh Perkembangan Subkategori Penyediaan Akomodasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Junal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32, 135–140.

Sarwoko. (2005). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Penerbit Andi.

- Sunusi, D. K., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintahan Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 120–137.
- Supriadi, B., & Roedjinandari, N. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata* (Pertama). Universitas Negeri Malang.
- Syamsi, A. B. (2014). *Investasi Asing Dalam Islam*. I, 34–47.
- Tanaya, S. A. (2018). *Peran DJKN dalam Pengembangan Sektor Pariwisata*.
- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8).
- Tradena, D. (2017). *Pengaruh Industri Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. 1–146.
- Utama, I. G. B. R. (2014). *Pengantar Industri Pariwisata : Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif* (Pertama). Deepublish.
- Utomo, A. P., Sumartini, N. P., Pinta, A., Siregar, G., Nagari, N., Tinggi, S., Statistik, I., Otista, J., & No, R. (2014). Regresi Robust untuk Memodelkan Pendapatan Usaha Industri Makanan Non-Makloon Berskala Mikro Dan Kecil Di Jawa Barat Tahun 2013. *Jurnal Matematika, Sains Dan Teknologi*, 15(2), 63–74.
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis Islam* (pertama). EKONISIA.
- Wihda, B. M., & Poerwono, D. (2014). Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I

- Yogyakarta (Tahun 1996 – 2012). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–12.
- Winarno, W. W. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan E-Views* (kedua). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Windriyaningrum, L. A. (2013). *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, Dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011*.
- Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 6(2), 1–89.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180.
- Zenda, R. H., & Suparno. (2017). Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 371–384.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Ayat al-Qur'an

No	Surat	Terjemahan
1.	Q.S At-Taubah [9]: 29	<i>“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu (orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”</i>
2.	Q.S An-Nisa' [4]: 9	<i>“Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar”</i>
3.	Q.S Yusuf [12]: 47-49	<i>(47) “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. (49) Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”</i>
4.	Q.S An-Nahl [16]: 97	<i>“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”</i>

Lampiran 2 : Data Penelitian

Provinsi	Tahun	PIP	PP	PMDN	PMA	TK
ACEH	2011	981.59	8917.05	259.4	22.5	1,790,369
ACEH	2012	1059.91	10688.98	60.2	172.3	1,808,357
ACEH	2013	1125.25	12640.53	3,636.4	94.2	1,842,671
ACEH	2014	1200.80	13368.03	5,110.3	31.1	1,931,823
ACEH	2015	1280.72	12611.11	4,192.4	21.2	1,966,018
ACEH	2016	1388.23	12653.24	2,456.1	134.5	2,087,045
ACEH	2017	1544.95	14813.72	782.8	23.2	2,138,512
ACEH	2018	1672.91	15454.83	970.0	71.2	2,203,717
ACEH	2019	1785.44	17177.51	3,606.9	137.5	2,219,698
SUMATERA UTARA	2011	7527.50	8917.05	1,673.0	753.7	5,532,968
SUMATERA UTARA	2012	8035.64	7922.71	2,550.30	645.3	5,880,885
SUMATERA UTARA	2013	8663.61	7412.09	5,068.9	887.5	6,081,301
SUMATERA UTARA	2014	9225.42	8526.30	4,223.9	550.8	5,881,371
SUMATERA UTARA	2015	9866.78	8495.66	4,287.4	1,246.1	5,962,304
SUMATERA UTARA	2016	10512.20	10976.90	4,864.2	1,014.7	5,991,229
SUMATERA UTARA	2017	11282.16	13402.54	11,683.6	1,514.9	6,365,989
SUMATERA UTARA	2018	12131.74	13867.54	8,371.8	1,227.6	6,728,431
SUMATERA UTARA	2019	13209.12	15827.75	19,749.0	379.5	6,681,224
SUMATERA BARAT	2011	1120.07	2406.38	1,026.2	22.9	2,051,696
SUMATERA BARAT	2012	1179.36	3283.83	885.3	75.0	2,085,483
SUMATERA BARAT	2013	1248.92	3424.59	677.8	91.4	2,061,109
SUMATERA BARAT	2014	1329.40	3722.30	421.1	112.1	2,180,336
SUMATERA BARAT	2015	1420.41	4326.35	1,552.5	57.1	2,184,599
SUMATERA BARAT	2016	1557.10	4876.17	3,795.6	79.3	2,347,911
SUMATERA BARAT	2017	1693.49	6363.96	1,517.0	194.4	2,344,972
SUMATERA BARAT	2018	1832.88	6696.64	2,309.4	180.8	2,410,450
SUMATERA BARAT	2019	1981.56	7150.37	3,026.6	157.1	2,460,554
RIAU	2011	1588.04	5861.96	7,462.6	212.3	2,311,171
RIAU	2012	1752.60	8754.00	5,450.4	1,152.9	2,399,851
RIAU	2013	1856.46	8972.96	4,874.3	1,304.9	2,479,493
RIAU	2014	1985.85	8276.75	7,707.6	1,369.5	2,518,485
RIAU	2015	2023.32	10892.86	9,943.0	653.4	2,554,296
RIAU	2016	2087.36	10075.13	6,613.7	869.1	2,765,946
RIAU	2017	2179.20	9247.19	10,829.8	1,061.10	2,781,021
RIAU	2018	2280.96	10326.45	9,056.4	1,032.9	2,915,597
RIAU	2019	2338.96	9179.05	26,292.2	1,034.0	2,996,079
JAMBI	2011	901.25	2432.07	2,134.9	19.5	1,393,554
JAMBI	2012	970.92	3287.10	1,445.7	156.3	1,436,527
JAMBI	2013	1033.11	3577.07	2,799.6	34.3	1,397,247
JAMBI	2014	1226.62	3265.33	908.0	51.4	1,491,038
JAMBI	2015	1306.24	3604.25	3,540.2	107.7	1,550,403
JAMBI	2016	1406.11	3381.89	3,884.4	61.0	1,624,522
JAMBI	2017	1517.93	4583.49	3,006.6	76.8	1,657,817
JAMBI	2018	1619.51	4515.14	2,876.5	101.9	1,721,362
JAMBI	2019	1700.44	4828.41	4,437.4	54.6	1,691,782

SUMATERA SELATAN	2011	2321.67	4354.30	1,068.9	557.3	3,417,374
SUMATERA SELATAN	2012	2529.82	5701.06	2,930.6	786.4	3,582,099
SUMATERA SELATAN	2013	2605.77	5989.48	3,396.0	485.9	3,524,883
SUMATERA SELATAN	2014	2752.59	7417.57	7042.8	1,056.5	3,692,806
SUMATERA SELATAN	2015	3024.31	6030.39	10,944.1	645.8	3,695,866
SUMATERA SELATAN	2016	3331.90	6627.64	8,534.1	2,793.5	3,998,637
SUMATERA SELATAN	2017	3603.38	8260.83	8,200.2	1,182.9	3,942,534
SUMATERA SELATAN	2018	4077.32	6900.58	9,519.8	1,078.6	3,963,870
SUMATERA SELATAN	2019	4703.22	9713.47	16,921.1	736.5	3,968,499
BENGKULU	2011	413.63	1206.66	30.55	43.1	837,674
BENGKULU	2012	446.71	1759.87	52.6	30.4	853,784
BENGKULU	2013	481.58	1937.73	109.6	22.3	832,048
BENGKULU	2014	525.95	1909.18	7.8	19.3	868,794
BENGKULU	2015	571.74	2436.20	553.9	20.6	904,317
BENGKULU	2016	627.00	2491.65	949.1	55.7	964,971
BENGKULU	2017	683.98	3243.39	296.5	138.7	932,976
BENGKULU	2018	738.54	3434.72	4,902.8	136.6	963,463
BENGKULU	2019	813.11	3639.87	5,458.1	144.8	981,095
LAMPUNG	2011	1936.23	2689.17	824.4	79.5	3,368,486
LAMPUNG	2012	2119.58	3859.69	304.2	114.3	3,516,856
LAMPUNG	2013	2242.99	3925.66	1,325.3	46.8	3,471,602
LAMPUNG	2014	2416.47	4324.71	3,495.7	156.5	3,673,158
LAMPUNG	2015	2632.96	4898.78	1,102.3	257.7	3,635,258
LAMPUNG	2016	2813.11	5691.24	6,031.8	85.7	3,931,321
LAMPUNG	2017	3038.88	7017.86	7,014.8	120.6	3,896,230
LAMPUNG	2018	3357.79	8147.85	12,314.7	132.3	4,060,377
LAMPUNG	2019	3663.40	7807.92	2,428.9	155.2	4,077,930
KEP. BABEL	2011	808.36	1433.93	514.4	146.0	555,258
KEP. BABEL	2012	930.99	1627.06	533.5	59.2	585,493
KEP. BABEL	2013	930.99	1814.13	608.2	112.4	597,613
KEP. BABEL	2014	1000.56	2015.86	615.5	105.0	604,223
KEP. BABEL	2015	1034.81	2212.65	1,023.7	82.7	623,949
KEP. BABEL	2016	1086.47	2287.56	2,202.0	52.7	686,830
KEP. BABEL	2017	1136.53	2468.72	1,734.7	153.1	672,618
KEP. BABEL	2018	1207.18	2874.91	3,112.9	46.3	701,366
KEP. BABEL	2019	1318.93	2962.02	2,915.2	88.7	715,927
KEP. RIAU	2011	2277.42	2251.88	1,370.4	219.7	763,349
KEP. RIAU	2012	2474.83	2764.15	43.5	537.1	801,510
KEP. RIAU	2013	2665.83	3358.01	417.7	315.7	806,073
KEP. RIAU	2014	2842.91	3495.00	28.5	392.1	819,656
KEP. RIAU	2015	3002.93	2649.78	612.1	640.4	836,670
KEP. RIAU	2016	3159.14	2852.61	492.5	519.1	859,813
KEP. RIAU	2017	3536.02	3525.10	1,398.0	1,031.5	896,931
KEP. RIAU	2018	3925.06	3594.77	4,386.0	831.3	901,019
KEP. RIAU	2019	4305.99	3659.56	5,656.4	1,363.4	935,682

Catatan : Data PMDN tahun 2011 Provinsi Bengkulu merupakan hasil Interpolasi dengan *software* Stata-14. Hal ini dikarenakan data yang tersedia di BPS maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak tersedia. Sehingga dilakukanlah interpolasi.

DKI JAKARTA	2011	57627.41	33223.44	9,256.4	4,824.1	4,528,589
DKI JAKARTA	2012	61258.50	41854.73	8,540.1	4,107.7	4,823,858
DKI JAKARTA	2013	65235.43	48981.27	5,754.5	2,591.1	4,668,239
DKI JAKARTA	2014	68850.61	72000.14	17,811.5	4,509.4	4,634,369
DKI JAKARTA	2015	72599.62	53419.02	15,512.7	3,619.4	4,724,029
DKI JAKARTA	2016	76873.47	59392.46	12,216.9	3,398.2	4,861,832
DKI JAKARTA	2017	81389.91	73535.70	47,262.3	4,595.0	4,509,171
DKI JAKARTA	2018	85779.67	77117.37	49,097.4	4,857.7	4,726,779
DKI JAKARTA	2019	92080.90	89088.35	62,094.8	4,123.0	4,836,977
JAWA BARAT	2011	23196.04	13503.60	11,194.3	3839.4	17,407,516
JAWA BARAT	2012	24806.72	19881.32	11,384.0	4,210.7	18,615,753
JAWA BARAT	2013	25985.30	22172.24	9,006.1	7,124.9	18,731,943
JAWA BARAT	2014	27545.03	21496.79	18,726.9	6,562.0	19,230,943
JAWA BARAT	2015	29776.55	28561.85	26,272.9	5,738.7	18,791,482
JAWA BARAT	2016	32559.35	31344.46	30,360.2	5,470.9	19,202,038
JAWA BARAT	2017	35285.42	35512.08	38,390.6	5,142.9	20,551,575
JAWA BARAT	2018	38160.14	33961.20	42,278.2	5,573.5	20,779,888
JAWA BARAT	2019	40928.32	37132.31	49,284.2	5,881.0	21,902,958
JAWA TENGAH	2011	19818.72	8786.75	2,737.8	175.0	15,822,765
JAWA TENGAH	2012	20871.60	12402.22	5,797.1	241.5	16,531,395
JAWA TENGAH	2013	21812.57	14649.38	12,593.6	464.3	16,469,960
JAWA TENGAH	2014	23471.64	14037.16	13,601.6	463.4	16,550,682
JAWA TENGAH	2015	25064.28	18517.59	15,410.7	850.4	16,435,142
JAWA TENGAH	2016	26633.47	20050.50	24,070.4	1,030.8	16,511,136
JAWA TENGAH	2017	28350.13	24349.75	19,866.0	2,372.5	17,186,674
JAWA TENGAH	2018	30667.22	25063.66	27,474.9	2,372.7	17,245,548
JAWA TENGAH	2019	33469.95	26652.34	18,654.7	2,723.2	17,441,153
DI. YOGYAKARTA	2011	6066.53	1859.14	1.6	2.4	1,839,824
DI. YOGYAKARTA	2012	6480.40	2465.34	334.0	84.9	1,906,145
DI. YOGYAKARTA	2013	6942.54	2986.26	283.8	29.6	1,886,071
DI. YOGYAKARTA	2014	7414.02	3381.02	703.9	64.9	1,956,043
DI. YOGYAKARTA	2015	7842.14	3911.11	362.4	89.1	1,891,218
DI. YOGYAKARTA	2016	8274.50	4270.07	948.6	19.6	2,042,400
DI. YOGYAKARTA	2017	8788.71	5279.62	294.6	36.5	2,053,168
DI. YOGYAKARTA	2018	9383.60	5566.33	6,131.7	81.3	2,118,392
DI. YOGYAKARTA	2019	10217.68	6149.11	6,298.8	14.6	2,134,750
JAWA TIMUR	2011	51667.02	13058.16	9,687.5	1,312.0	18,463,606
JAWA TIMUR	2012	54601.23	16902.52	21,520.3	2,298.8	19,338,902
JAWA TIMUR	2013	57684.94	19126.28	34,848.9	3,396.3	19,553,910
JAWA TIMUR	2014	62807.80	19613.57	38,132.0	1,802.5	19,306,508
JAWA TIMUR	2015	67657.04	24678.65	35,489.8	2593.4	19,367,777
JAWA TIMUR	2016	73397.92	26527.24	46,331.6	1,941.0	19,114,563
JAWA TIMUR	2017	79202.19	31851.42	45,044.5	1,566.7	20,099,220
JAWA TIMUR	2018	85247.50	30768.59	33,333.1	1,333.4	20,449,949
JAWA TIMUR	2019	91711.07	33843.73	45,452.7	866.3	20,655,632

BANTEN	2011	6709.73	4291.46	4,298.6	2,171.7	4,376,110
BANTEN	2012	7081.44	5788.55	5,117.5	2,716.3	4,662,368
BANTEN	2013	7356.97	6681.04	4,008.7	3,720.2	4,687,626
BANTEN	2014	8006.95	7637.49	8,081.3	2,034.6	4,853,992
BANTEN	2015	8520.04	9236.22	10,709.9	2,542.0	4,825,460
BANTEN	2016	9165.73	9786.47	12,426.3	2,912.1	5,088,497
BANTEN	2017	9924.75	10265.22	15,141.9	3,047.5	5,077,400
BANTEN	2018	10664.40	11362.38	18,637.6	2,827.3	5,332,496
BANTEN	2019	11511.85	12285.53	20,708.4	1,868.2	5,562,846
BALI	2011	19159.71	3366.46	313.4	482.1	2,159,158
BALI	2012	20655.91	4420.45	3,108.0	482.0	2,252,475
BALI	2013	22287.90	5008.58	2,984.7	390.9	2,242,076
BALI	2014	23807.92	4709.67	252.8	427.1	2,272,632
BALI	2015	25309.40	5873.71	1,250.4	495.8	2,324,805
BALI	2016	26983.85	5923.70	482.3	450.6	2,416,555
BALI	2017	29420.23	6478.85	592.5	886.9	2,398,307
BALI	2018	31264.32	6664.15	1,548.8	1,002.5	2,490,870
BALI	2019	32768.91	6834.26	7,393.2	426.0	2,428,679
NUSA TENGGARA BARAT	2011	1065.28	1706.63	42.3	465.1	1,974,093
NUSA TENGGARA BARAT	2012	1143.81	2260.53	45.4	635.8	2,015,699
NUSA TENGGARA BARAT	2013	1242.60	2407.73	1,398.0	488.2	2,032,282
NUSA TENGGARA BARAT	2014	1328.64	2874.21	212.5	551.1	2,094,100
NUSA TENGGARA BARAT	2015	1403.76	3647.33	347.8	699.4	2,127,503
NUSA TENGGARA BARAT	2016	1545.45	4148.66	1,342.8	439.0	2,367,310
NUSA TENGGARA BARAT	2017	1657.81	5421.93	5,413.5	132.1	2,316,720
NUSA TENGGARA BARAT	2018	1581.68	5314.63	4,135.1	251.6	2,154,124
NUSA TENGGARA BARAT	2019	1580.49	5273.58	3,519.0	270.7	2,387,036
NUSA TENGGARA TIMUR	2011	263.41	1444.71	1.0	5.5	2,032,237
NUSA TENGGARA TIMUR	2012	279.07	2430.25	14.4	8.7	2,120,249
NUSA TENGGARA TIMUR	2013	299.56	2639.02	17.6	9.9	2,104,507
NUSA TENGGARA TIMUR	2014	318.29	2818.93	3.6	15.1	2,174,228
NUSA TENGGARA TIMUR	2015	337.93	3570.23	1,295.7	69.9	2,219,291
NUSA TENGGARA TIMUR	2016	386.80	4040.76	822.2	58.2	2,277,068
NUSA TENGGARA TIMUR	2017	439.34	4987.99	1,081.9	139.0	2,320,061
NUSA TENGGARA TIMUR	2018	492.78	4968.98	4,246.1	100.4	2,411,533
NUSA TENGGARA TIMUR	2019	522.29	5448.45	3,752.6	126.8	2,394,673
KALIMANTAN BARAT	2011	2070.13	2433.95	1,404.0	500.7	2,158,251
KALIMANTAN BARAT	2012	2203.80	3316.22	2,811.0	397.5	2,196,455
KALIMANTAN BARAT	2013	2313.35	3484.57	2,522.1	650.0	2,172,337
KALIMANTAN BARAT	2014	2447.72	3829.90	4,320.8	966.1	2,226,510
KALIMANTAN BARAT	2015	2592.13	4207.75	6,143.5	1,335.7	2,235,887
KALIMANTAN BARAT	2016	2705.51	4503.52	9,015.5	630.7	2,287,823
KALIMANTAN BARAT	2017	2811.47	5562.10	12,380.9	568.4	2,303,198
KALIMANTAN BARAT	2018	3008.06	5598.16	6,591.4	491.9	2,346,881
KALIMANTAN BARAT	2019	3204.07	5910.67	7,699.1	532.3	2,369,015
KALIMANTAN TENGAH	2011	968.50	2054.05	3,376.0	543.7	1,079,036
KALIMANTAN TENGAH	2012	1061.70	2965.64	4,529.6	524.7	1,112,252
KALIMANTAN TENGAH	2013	1125.40	3368.43	1,835.3	481.6	1,124,017
KALIMANTAN TENGAH	2014	1217.80	3276.41	980.4	951.0	1,154,489
KALIMANTAN TENGAH	2015	1321.50	3546.93	1,270.1	933.6	1,214,681
KALIMANTAN TENGAH	2016	1425.30	3587.86	8,179.1	408.2	1,248,189
KALIMANTAN TENGAH	2017	1504.00	4412.60	3,037.8	641.0	1,222,707
KALIMANTAN TENGAH	2018	1608.20	4625.11	13,091.6	678.5	1,301,002
KALIMANTAN TENGAH	2019	1705.50	5456.29	8,591.9	283.5	1,327,885

KALIMANTAN SELATAN	2011	1556.32	3472.92	2,118.3	272.1	1,776,088
KALIMANTAN SELATAN	2012	1679.87	5315.57	3,509.8	272.3	1,833,892
KALIMANTAN SELATAN	2013	1807.33	5554.74	8,299.2	260.6	1,830,813
KALIMANTAN SELATAN	2014	1925.50	5356.33	2,616.5	502.5	1,867,462
KALIMANTAN SELATAN	2015	2046.41	5500.27	2,060.4	961.2	1,889,502
KALIMANTAN SELATAN	2016	2184.41	5600.69	6,163.0	249.4	1,965,088
KALIMANTAN SELATAN	2017	2333.90	6002.25	2,981.9	243.8	1,975,161
KALIMANTAN SELATAN	2018	2497.51	6469.07	9,975.2	129.2	2,021,666
KALIMANTAN SELATAN	2019	2682.55	7031.95	10,061.0	372.9	2,036,736
KALIMANTAN TIMUR	2011	2990.01	11469.54	6,569.1	602.4	1,521,316
KALIMANTAN TIMUR	2012	3272.61	14724.20	5,889.3	2,014.1	1,607,526
KALIMANTAN TIMUR	2013	3386.23	14830.60	16,057	1,381.3	1,603,915
KALIMANTAN TIMUR	2014	3582.83	13930.00	13,501.8	2,254	1,677,466
KALIMANTAN TIMUR	2015	3854.75	12005.15	10,533.1	2,611.3	1,690,980
KALIMANTAN TIMUR	2016	4124.37	11280.63	10,230.8	1,300.4	1,854,662
KALIMANTAN TIMUR	2017	4500.07	11351.31	11,833.5	1,434.2	1,853,091
KALIMANTAN TIMUR	2018	4916.03	11778.75	27,298.8	654.8	1,941,685
KALIMANTAN TIMUR	2019	5232.02	13775.59	26,352.9	942.70	2,038,585
SULAWESI UTARA	2011	1101.93	1474.98	331.6	220.2	953,546
SULAWESI UTARA	2012	1192.72	2024.02	678.5	46.7	973,035
SULAWESI UTARA	2013	1285.41	2315.00	66.8	65.7	965,457
SULAWESI UTARA	2014	1423.03	2477.62	83.0	98.4	980,756
SULAWESI UTARA	2015	1543.97	2818.67	270.6	88.0	1,000,032
SULAWESI UTARA	2016	1736.05	2985.77	5,069.6	382.8	1,110,564
SULAWESI UTARA	2017	1848.84	3891.53	1,488.2	482.9	1,040,826
SULAWESI UTARA	2018	1958.95	4231.70	4,320.1	295.9	1,095,145
SULAWESI UTARA	2019	2013.89	4524.49	8,259.6	220.5	1,131,521
SULAWESI TENGAH	2011	313.91	1631.30	2,620.2	370.4	1,211,745
SULAWESI TENGAH	2012	335.95	2171.61	602.8	806.5	1,224,095
SULAWESI TENGAH	2013	362.74	2280.72	605.3	855	1,239,122
SULAWESI TENGAH	2014	397.11	2447.18	95.8	1,494.2	1,293,226
SULAWESI TENGAH	2015	437.07	3037.42	968.4	1,085.2	1,327,418
SULAWESI TENGAH	2016	462.72	3253.13	1,081.2	1,600.3	1,459,803
SULAWESI TENGAH	2017	501.11	3708.73	1,929.7	1,545.6	1,374,214
SULAWESI TENGAH	2018	531.14	3634.80	8,488.9	672.4	1,451,491
SULAWESI TENGAH	2019	520.64	4323.33	4,438.8	1,805.0	1,439,759
SULAWESI SELATAN	2011	2483.83	3401.08	3,986.3	89.6	3,326,880
SULAWESI SELATAN	2012	2766.98	4646.30	2,318.9	582.6	3,421,101
SULAWESI SELATAN	2013	2953.97	5017.40	921.0	462.8	3,376,549
SULAWESI SELATAN	2014	3185.02	5890.38	4,949.6	280.9	3,527,036
SULAWESI SELATAN	2015	3370.06	6415.56	9,215.3	233.3	3,485,492
SULAWESI SELATAN	2016	3655.58	7292.54	3,334.6	372.5	3,694,712
SULAWESI SELATAN	2017	4091.98	9220.50	1,969.4	712.8	3,598,663
SULAWESI SELATAN	2018	4612.02	9699.71	3,275.9	617.2	3,774,924
SULAWESI SELATAN	2019	4895.97	10099.90	5,672.6	302.6	3,830,096
SULAWESI TENGGARA	2011	295.65	1487.71	59.0	17.0	954,981
SULAWESI TENGGARA	2012	330.96	1835.58	907.3	35.7	994,521
SULAWESI TENGGARA	2013	330.96	2176.24	1,261.6	86.4	997,231
SULAWESI TENGGARA	2014	358.54	2236.26	1,249.9	161.8	1,037,419
SULAWESI TENGGARA	2015	423.30	2886.69	2,015.4	145.0	1,074,916
SULAWESI TENGGARA	2016	454.45	3260.32	1,794.2	376.1	1,219,548
SULAWESI TENGGARA	2017	482.43	4033.24	3,148.7	693.0	1,160,974
SULAWESI TENGGARA	2018	514.71	3626.66	1,603.4	672.9	1,207,488
SULAWESI TENGGARA	2019	540.15	4310.57	3,827.1	987.7	1,217,983

Catatan: Data Kalimantan Utara di gabung ke Kalimantan Timur dikarenakan banyak data yang masih campur dengan Kalimantan Timur sebagai provinsi pemekaran.

GORONTALO	2011	360.80	794.42	11.8	12.5	445,242
GORONTALO	2012	383.57	997.14	164.9	35.3	455,322
GORONTALO	2013	417.94	1153.66	84.4	25.7	458,930
GORONTALO	2014	446.92	1304.66	45.1	4.1	479,137
GORONTALO	2015	482.90	1476.33	94.3	6.9	493,687
GORONTALO	2016	524.98	1652.70	2,202.5	12.7	546,668
GORONTALO	2017	580.73	1829.86	888.4	41.3	524,316
GORONTALO	2018	625.80	1817.55	2,666.8	40.8	555,533
GORONTALO	2019	667.08	1955.67	844.4	171.3	562,087
SULAWESI BARAT	2011	48.17	744.62	218.6	5.6	537,148
SULAWESI BARAT	2012	51.78	978.03	228.6	0.2	572,081
SULAWESI BARAT	2013	55.72	1175.24	685.1	2.5	545,438
SULAWESI BARAT	2014	59.36	1307.24	690.1	16.3	595,797
SULAWESI BARAT	2015	62.14	1473.75	1,103.8	2.0	595,905
SULAWESI BARAT	2016	67.94	1814.45	84.1	20.6	624,182
SULAWESI BARAT	2017	69.00	1977.20	660.2	11.4	595,004
SULAWESI BARAT	2018	74.47	1925.80	3,144.2	24.7	619,395
SULAWESI BARAT	2019	81.69	2135.48	1,187.2	10.1	641,613
MALUKU	2011	345.30	1193.67	0.1	11.7	618,899
MALUKU	2012	373.90	1514.75	3.4	8.5	613,357
MALUKU	2013	404.59	1694.90	5.4	52.8	602,429
MALUKU	2014	423.52	1926.72	7.4	13.1	601,651
MALUKU	2015	456.30	2304.54	9.4	82.4	655,063
MALUKU	2016	455.15	2831.65	11.4	102.6	690,786
MALUKU	2017	474.63	2845.81	52.3	212.0	642,061
MALUKU	2018	497.89	3486.10	1,013.5	8.0	700,143
MALUKU	2019	526.08	3230.50	283.2	33.0	715,811
MALUKU UTARA	2011	70.10	952.52	13.5	129.8	426,466
MALUKU UTARA	2012	73.70	1396.45	320.5	90.3	450,184
MALUKU UTARA	2013	77.30	1441.12	1,114.9	268.5	454,978
MALUKU UTARA	2014	84.90	1649.65	156.3	98.7	456,017
MALUKU UTARA	2015	88.00	1856.13	48.2	203.8	482,543
MALUKU UTARA	2016	99.10	2061.13	8.8	438.9	503,479
MALUKU UTARA	2017	108.80	2312.01	1,150.6	228.1	488,715
MALUKU UTARA	2018	115.90	2526.25	2,276.3	362.8	515,615
MALUKU UTARA	2019	124.20	2762.09	682.7	1,008.5	522,423
PAPUA BARAT	2011	213.67	4053.07	47.2	33.1	331,124
PAPUA BARAT	2012	224.81	4271.51	45.8	32.0	347,559
PAPUA BARAT	2013	235.20	6010.27	304.0	54.2	359,527
PAPUA BARAT	2014	248.40	5920.20	100.0	153.4	378,436
PAPUA BARAT	2015	265.19	7506.27	63.4	258.6	380,226
PAPUA BARAT	2016	285.54	7257.00	10.6	514.5	402,360
PAPUA BARAT	2017	308.42	7839.00	59.2	84.7	402,526
PAPUA BARAT	2018	332.19	8017.78	50.9	286.9	417,544
PAPUA BARAT	2019	357.67	8729.20	380.2	46.2	433,401
PAPUA	2011	608.69	7183.48	1,378.9	1,312.0	1,449,790
PAPUA	2012	656.52	8241.64	54.7	1,202.4	1,485,799
PAPUA	2013	733.11	9129.56	584.3	2,360.0	1,559,675
PAPUA	2014	825.28	11315.08	249.9	1,260.6	1,617,437
PAPUA	2015	887.32	12986.63	1,275.2	897.0	1,672,480
PAPUA	2016	945.32	13071.34	220.5	1,168.4	1,664,485
PAPUA	2017	1002.40	14016.06	1,217.9	1,924.1	1,699,071
PAPUA	2018	1056.64	14142.27	104.6	1,132.3	1,777,207
PAPUA	2019	1113.67	13978.12	567.7	941.0	1,775,030

Catatan : Data PMDN tahun 2012, 2013 dan 2014 di Provinsi Maluku merupakan hasil Interpolasi dengan *software* Stata-14. Hal ini dikarenakan data yang tersedia di BPS maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak tersedia. Sehingga dilakukanlah interpolasi.

Lampiran 3 : Statistik Deskriptif

```
. sum PIP PP PMDN PMA TK
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
PIP	297	8745.675	18007.38	48.17292	92080.9
PP	297	8611.857	11757.88	744.623	89088.35
PMDN	297	6147.017	9977.945	.1	62094.8
PMA	297	838.9939	1252.296	.2	7124.9
TK	297	3542370	4980217	331124	2.19e+07

Lampiran 4: Pemilihan Common Effect Model

```
. reg ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	297
Model	574.832477	4	143.708119	F(4, 292)	=	145.72
Residual	287.973728	292	.986211398	Prob > F	=	0.0000
Total	862.806205	296	2.91488583	R-squared	=	0.6662
				Adj R-squared	=	0.6617
				Root MSE	=	.99308

ln_PIP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
PP	.0000394	6.16e-06	6.40	0.000	.0000273 .0000516
ln_PMDN	.1424127	.0347303	4.10	0.000	.0740592 .2107662
ln_PMA	.2019685	.0432134	4.67	0.000	.1169192 .2870178
TK	1.23e-07	1.45e-08	8.50	0.000	9.46e-08 1.52e-07
_cons	4.669103	.2441587	19.12	0.000	4.188569 5.149637

Lampiran 5 : Pemilihan Fixed Effect Model

```
. xtreg ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK, fe
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =      297
Group variable: Provinsi              Number of groups =      33

R-sq:                                  Obs per group:
  within = 0.6042                       min =          9
  between = 0.5722                      avg =         9.0
  overall = 0.5725                      max =          9

corr(u_i, Xb) = 0.1200                  F(4,260)       =      99.24
                                          Prob > F       =      0.0000
```

ln_PIP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
PP	9.54e-06	2.23e-06	4.28	0.000	5.16e-06	.0000139
ln_PMDN	.0538504	.0059475	9.05	0.000	.042139	.0655618
ln_PMA	.0541991	.0104373	5.19	0.000	.0336468	.0747515
TK	1.96e-07	2.87e-08	6.82	0.000	1.39e-07	2.53e-07
_cons	6.145439	.1035945	59.32	0.000	5.941448	6.34943
sigma_u	1.1336972					
sigma_e	.12415548					
rho	.98814886	(fraction of variance due to u_i)				

```
F test that all u_i=0: F(32, 260) = 575.68      Prob > F = 0.0000
```

Lampiran 6 : Pemilihan Random Effect Model

```
. xtreg ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK, re
```

```
Random-effects GLS regression      Number of obs   =      297
Group variable: Provinsi          Number of groups =      33

R-sq:                                  Obs per group:
  within = 0.6042                       min =          9
  between = 0.5747                      avg =         9.0
  overall = 0.5749                      max =          9

corr(u_i, X) = 0 (assumed)           Wald chi2(4)   =      437.38
                                          Prob > chi2    =      0.0000
```

ln_PIP	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
PP	.00001	2.17e-06	4.63	0.000	5.78e-06	.0000143
ln_PMDN	.0538924	.0060026	8.98	0.000	.0421276	.0656573
ln_PMA	.055954	.0105479	5.30	0.000	.0352805	.0766274
TK	1.95e-07	2.31e-08	8.44	0.000	1.50e-07	2.41e-07
_cons	6.134004	.200217	30.64	0.000	5.741586	6.526422
sigma_u	1.013963					
sigma_e	.12415548					
rho	.9852285	(fraction of variance due to u_i)				

Lampiran 7 : Uji Chow

```
. reg ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK i. Provinsi
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	297
Model	858.798414	36	23.8555115	F(36, 260)	=	1547.59
Residual	4.00779184	260	.015414584	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9954
				Adj R-squared	=	0.9947
Total	862.806205	296	2.91488583	Root MSE	=	.12416

ln_PIP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
PP	9.54e-06	2.23e-06	4.28	0.000	5.16e-06 .0000139
ln_PMDN	.0538504	.0059475	9.05	0.000	.042139 .0655618
ln_PMA	.0541991	.0104373	5.19	0.000	.0336468 .0747515
TK	1.96e-07	2.87e-08	6.82	0.000	1.39e-07 2.53e-07
Provinsi					
2	1.013176	.1354351	7.48	0.000	.7464864 1.279865
3	.1109803	.0630957	1.76	0.080	-.0132634 .235224
4	.0836827	.0686788	1.22	0.224	-.0515549 .2189203
5	.1022975	.0618591	1.65	0.099	-.0195111 .224106
6	.3560575	.0863527	4.12	0.000	.1860177 .5260972
7	-.4148375	.0645803	-6.42	0.000	-.5420045 -.2876705
8	.3623716	.0840699	4.31	0.000	.196827 .5279161
9	.1219198	.0681652	1.79	0.075	-.0123064 .2561459
10	1.090022	.0705487	15.45	0.000	.9511021 1.228941
11	2.655687	.1138135	23.33	0.000	2.431573 2.8798
12	-.8151927	.4882902	-1.67	0.096	-1.7767 .1463141
13	-.239366	.4183277	-0.57	0.568	-1.063108 .5843757
14	1.969568	.0619715	31.78	0.000	1.847538 2.091598
15	.0380529	.4943434	0.08	0.939	-.9353735 1.011479
16	1.036831	.1117145	9.28	0.000	.8168504 1.256811
17	2.855078	.0672647	42.45	0.000	2.722625 2.987531
18	-.0402133	.0667404	0.60	0.547	-.0912072 .1716339
19	-1.09536	.0644881	-16.99	0.000	-1.222346 -.9683749
20	.5047934	.0681716	7.40	0.000	.3705547 .6390321
21	.0613964	.0679927	0.90	0.367	-.0724901 .1952829
22	.3766543	.0635717	5.92	0.000	.2514733 .5018353
23	.8529587	.0673489	12.66	0.000	.7203401 .9855774
24	.4151965	.0651057	6.38	0.000	.2869949 .5433982
25	-1.061507	.0699212	-15.18	0.000	-1.199191 -.9238232
26	.5783479	.080501	7.18	0.000	.4198309 .7368649
27	-.9581153	.0650446	-14.73	0.000	-1.086197 -.830034
28	-.4416581	.0688753	-6.41	0.000	-.5772824 -.3060338
29	-2.486384	.0708956	-35.07	0.000	-2.625987 -2.346781
30	-.458982	.0688316	-6.67	0.000	-.5945203 -.3234437
31	-2.231919	.0719606	-31.02	0.000	-2.373618 -2.090219
32	-1.076711	.0724143	-14.87	0.000	-1.219305 -.9341183
33	-.4493572	.0688466	-6.53	0.000	-.5849252 -.3137893
_cons	6.057684	.0741021	81.75	0.000	5.911768 6.203601

```

. testparm i. Provinsi

( 1) 2.Provinsi = 0
( 2) 3.Provinsi = 0
( 3) 4.Provinsi = 0
( 4) 5.Provinsi = 0
( 5) 6.Provinsi = 0
( 6) 7.Provinsi = 0
( 7) 8.Provinsi = 0
( 8) 9.Provinsi = 0
( 9) 10.Provinsi = 0
(10) 11.Provinsi = 0
(11) 12.Provinsi = 0
(12) 13.Provinsi = 0
(13) 14.Provinsi = 0
(14) 15.Provinsi = 0
(15) 16.Provinsi = 0
(16) 17.Provinsi = 0
(17) 18.Provinsi = 0
(18) 19.Provinsi = 0
(19) 20.Provinsi = 0
(20) 21.Provinsi = 0
(21) 22.Provinsi = 0
(22) 23.Provinsi = 0
(23) 24.Provinsi = 0
(24) 25.Provinsi = 0
(25) 26.Provinsi = 0
(26) 27.Provinsi = 0
(27) 28.Provinsi = 0
(28) 29.Provinsi = 0
(29) 30.Provinsi = 0
(30) 31.Provinsi = 0
(31) 32.Provinsi = 0
(32) 33.Provinsi = 0

F( 32, 260) = 575.68
Prob > F = 0.0000

```

Lampiran 8 : Uji Hausman

```
. hausman fixed
```

Note: the rank of the differenced variance matrix (3) does not equal the number of coefficients being tested (4); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test. Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fixed	(B) .		
PP	9.54e-06	.00001	-4.80e-07	5.24e-07
ln_PMDN	.0538504	.0538924	-.000042	.
ln_PMA	.0541991	.055954	-.0017548	.
TK	1.96e-07	1.95e-07	8.01e-10	1.71e-08

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

```

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= -0.38 chi2<0 ==> model fitted on these
data fails to meet the asymptotic
assumptions of the Hausman test;
see suest for a generalized test

```


Lampiran 9: Uji Normalitas

```
. swilk ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK
```

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
ln_PIP	297	0.97365	5.565	4.027	0.00003
PP	297	0.56619	91.603	10.599	0.00000
ln_PMDN	297	0.93484	13.760	6.151	0.00000
ln_PMA	297	0.97462	5.358	3.939	0.00004
TK	297	0.57036	90.721	10.576	0.00000

Lampiran 10 : Uji Multikolinearitas

```
. reg ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	297
Model	574.832477	4	143.708119	F(4, 292)	= 145.72
Residual	287.973728	292	.986211398	Prob > F	= 0.0000
Total	862.806205	296	2.91488583	R-squared	= 0.6662
				Adj R-squared	= 0.6617
				Root MSE	= .99308

ln_PIP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
PP	.0000394	6.16e-06	6.40	0.000	.0000273 .0000516
ln_PMDN	.1424127	.0347303	4.10	0.000	.0740592 .2107662
ln_PMA	.2019685	.0432134	4.67	0.000	.1169192 .2870178
TK	1.23e-07	1.45e-08	8.50	0.000	9.46e-08 1.52e-07
_cons	4.669103	.2441587	19.12	0.000	4.188569 5.149637

```
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
ln_PMA	1.77	0.566120
ln_PMDN	1.74	0.574282
PP	1.58	0.634260
TK	1.56	0.640919
Mean VIF	1.66	

Lampiran 11 : Uji Heteroskedastisitas

```
. xtreg ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK, fe
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =       297
Group variable: Provinsi              Number of groups =        33

R-sq:                                  Obs per group:
    within = 0.6042                    min =           9
    between = 0.5722                   avg =          9.0
    overall = 0.5725                    max =           9

corr(u_i, Xb) = 0.1200                  F(4,260)        =       99.24
                                          Prob > F         =       0.0000
```

ln_PIP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
PP	9.54e-06	2.23e-06	4.28	0.000	5.16e-06	.0000139
ln_PMDN	.0538504	.0059475	9.05	0.000	.042139	.0655618
ln_PMA	.0541991	.0104373	5.19	0.000	.0336468	.0747515
TK	1.96e-07	2.87e-08	6.82	0.000	1.39e-07	2.53e-07
_cons	6.145439	.1035945	59.32	0.000	5.941448	6.34943
sigma_u	1.1336972					
sigma_e	.12415548					
rho	.98814886	(fraction of variance due to u_i)				

```
F test that all u_i=0: F(32, 260) = 575.68      Prob > F = 0.0000
```

```
. xttest3
```

```
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model
```

```
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
```

```
chi2 (33) = 710.37
Prob>chi2 = 0.0000
```

Lampiran 12 : Uji Autokorelasi

```
. xtserial ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK
```

```
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
```

```
H0: no first-order autocorrelation
F( 1, 32) = 286.490
Prob > F = 0.0000
```

Lampiran 13 : Uji Robust Standard Error

```
. xtreg ln_PIP PP ln_PMDN ln_PMA TK, fe cluster (Provinsi)

Fixed-effects (within) regression           Number of obs   =       297
Group variable: Provinsi                   Number of groups =        33

R-sq:                                     Obs per group:
    within = 0.6042                        min =           9
    between = 0.5722                       avg =          9.0
    overall = 0.5725                       max =           9

corr(u_i, Xb) = 0.1200                    F(4,32)         =       58.78
                                                Prob > F        =       0.0000
```

(Std. Err. adjusted for 33 clusters in Provinsi)

ln_PIP	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
PP	9.54e-06	4.10e-06	2.33	0.026	1.19e-06	.0000179
ln_PMDN	.0538504	.0064208	8.39	0.000	.0407717	.0669292
ln_PMA	.0541991	.0120425	4.50	0.000	.0296693	.078729
TK	1.96e-07	9.29e-08	2.11	0.043	6.84e-09	3.85e-07
_cons	6.145439	.2917336	21.07	0.000	5.551197	6.739681
sigma_u	1.1336972					
sigma_e	.12415548					
rho	.98814886	(fraction of variance due to u_i)				

DATA DIRI

Nama : Indah Setiani

Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Seberuk, 08 April 1999

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Lubuk Seberuk, RT 01, RW
01, Kecamatan Lempuing Jaya,
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Nomor telephone : 082220865739

Email : indahsetiani8april@gmail.com

Motto : *“Jadikan hari ini Pembelajaran, dan esok adalah
Kesuksesan”*



PENDIDIKAN FORMAL

1. 2005-2011 SD Negeri 2 Lubuk Seberuk
2. 2011-2014 SMP Negeri 1 Lempuing Jaya
3. 2014-2017 SMA Negeri 1 Lempuing Jaya
4. 2017-2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ORGANISASI

- | | |
|------------|---|
| 2017 -2020 | KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 2018-2020 | FEBIPRENEUR UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 2019-2020 | GenBI Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 2018-2020 | Relawan Lazis NU Yogyakarta |